



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

INSPEKTORAT

Jl. Pemuda I / 55 Wonogiri 57612
Telepon(0273) 321138 Faks. (0273) 321138
E-Mail : inspektorat@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2021 pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
 12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 320);
 13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
 14. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan ruang lingkup Badan Publik, Kewajiban dan Hak Badan Publik, PPID, Informasi Publik yang Dikecualikan, Standar Pelayanan Informasi Publik, Penyampaian Informasi Publik, Laporan dan Evaluasi, dan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- 1) Informasi Wajib Diumumkan secara Berkala;
 - 2) Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat;
 - 3) Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 10 - 2 - 2022

INSPEKTUR,

MARDIANTO, S.E.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022

A. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA								
No.	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu /Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Informasi tentang profil Badan Publik								
1	Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap	Jl. Pemuda 1/55 Wonogiri 57612 No. Telp (0273) 321138 email : inspektoratwonogiri@yahoo.com	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Inspektur	Tahun 2022	hardcopy & Softcopy	selama berlaku	
2	Struktur Organisasi , Tugas, Wewenang & Fungsi	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 71 Tahun 2016	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Inspektur	Tahun 2016	hardcopy & Softcopy	selama berlaku	
3	Profil Singkat Pejabat Struktural	Mardianto, S.E. (Inspektur) Tri Lasmi, S.E., M.M. (Sekretaris) Drs. Edy Martono, M.M. (Irbang Bidang AAP) Sriyono, S.Sos, M.M. (Irbang Bidang Ekbang) Dewi Attutianingrum, S.Sos, M.M (Irbang Bidang KAD) Aris Dewi Anggralni, S.E., M.M (Kasubbag Keuangan) Murni Hastuti, S.E. (Kasubbag Umum & Kepegawaian)	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Inspektur	Tahun 2021	hardcopy & Softcopy	selama berlaku	
4	Laporan Harta Kekayaan bagi yang Wajib Melaksanakannya	31 Orang	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Inspektur	Tahun 2022	hardcopy & Softcopy	selama berlaku	
5	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau Kegiatan yang sedang Dijalankan dalam Lingkup Badan Publik							
	Nama program & kegiatan	Daftar nama program & kegiatan tertuang dalam DPA TA.2022 Inspektorat Kabupaten Wonogiri	Sekretaris	Inspektur	Tahun 2022	hardcopy	selama berlaku	
	Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan	Daftar nama Penanggungjawab, pelaksana program & kegiatan tertuang dalam DPA TA.2022 Inspektorat Kabupaten Wonogiri	Sekretaris	Inspektur	Tahun 2022	hardcopy	selama berlaku	
	Target dan/atau capaian program dan kegiatan	Target dan/atau capaian program & kegiatan tertuang dalam DPA TA.2022 Inspektorat Kabupaten Wonogiri	Sekretaris	Inspektur	Tahun 2022	hardcopy	selama berlaku	
	Jadwal Pelaksanaan program dan kegiatan	Jadwal Pelaksanaan program dan kegiatan tertuang dalam DPA 2022 dan PKPT 2022	Sekretaris	Inspektur	Tahun 2022	hardcopy	selama berlaku	
	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah	Anggaran program & kegiatan tertuang dalam DPA TA.2022 Inspektorat Kabupaten Wonogiri	Sekretaris	Inspektur	Tahun 2022	hardcopy	selama berlaku	

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu /Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Agenda Penting Terkait Pelaksanaan Tugas Badan Publik	Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022	Sekretaris	Inspektur	Tahun 2021	hardcopy & Softcopy	selama berlaku	
		Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 700/292/HK/2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2022	Sekretaris	Inspektur	Tahun 2021	hardcopy & Softcopy	selama berlaku	
8	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	Pelayanan aduan masyarakat, konsultasi & konseling serta sekretariat Saber Pungli	Inspektur	Inspektur	Tahun 2022	hardcopy & Softcopy	selama berlaku	
9	Informasi tentang Penerimaan Calon Pegawai	-		-	-	-	-	
10	Informasi tentang Kinerja (LKJ IP)	Adalah tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 yang memuat: capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri di Tahun 2020 berdasarkan rencana kegiatan pengawasan tahunan dan rencana anggaran serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan rencana perbaikan kedepannya.	Sekretaris	Inspektur	Tahun 2022	hardcopy & Softcopy	selama berlaku	ppid.wonogirikab.go.id
11	Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Rutin atas Realisasi Anggaran	Kasubbag Keuangan	Inspektur	Tahun 2022	hardcopy & Softcopy	selama berlaku	
12	Neraca 2020 :	Tentang Neraca Keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021	Kasubbag Keuangan	Inspektur	Tahun 2022	hardcopy & Softcopy	selama berlaku	
13	Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang Disusun sesuai dengan Standar Akuntansi yang Berlaku	Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021	Kasubbag Keuangan	Inspektur	Tahun 2022	hardcopy & Softcopy	selama berlaku	ppid.wonogirikab.go.id
14	Laporan tentang data aset dan Investasi	Dokumen data aset	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Inspektur	Tahun 2022	hardcopy & Softcopy	Selama berlaku	
15	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik	Jumlah Permintaan informasi (Nihil)	Sekretaris	Inspektur	-	-	-	
		Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi (sesuai SOP)	Sekretaris	Inspektur	-	-	-	
		Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak (Nihil)	Sekretaris	Inspektur	-	-	-	
		Alasan Penolakan Informasi	Sekretaris	Inspektur	-	-	-	

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu /Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT								
1	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas :							
	Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan			-	-	-	-	-
	Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan			-	-	-	-	-
	Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan			-	-	-	-	-
	Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan			-	-	-	-	-
	Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan			-	-	-	-	-
	Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan			-	-	-	-	-
2	Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala							
C. INFORMASI TENTANG ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN								
3	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan		Kasubbag Keuangan & Kasubbag Umum & Kepegawaian	Inspektur	Tahun 2022	Hardcopy & Softcopy	Selama Dibutuhkan	-
4	Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima		Kasubbag Umum & Kepegawaian	Inspektur	Tahun 2022	Hardcopy & Softcopy	Selama Dibutuhkan	-
5	Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya		Kasubbag Keuangan	Inspektur	Tahun 2022	Hardcopy & Softcopy	Selama Dibutuhkan	-
6	Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik		Sekretaris	Inspektur	Tahun 2022	Hardcopy & Softcopy	Selama Dibutuhkan	-
7	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya		Kasubbag Umum & Kepegawaian	Inspektur	Tahun 2022	Hardcopy & Softcopy	Selama Dibutuhkan	-
8	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya		Kasubbag Umum & Kepegawaian	Inspektur	Tahun 2022	Hardcopy & Softcopy	Selama Dibutuhkan	-
9	Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan		Kasubbag Umum & Kepegawaian	Inspektur	Tahun 2022	Hardcopy & Softcopy	Selama Dibutuhkan	-
10	Data perbendaharaan atau inventaris		Kasubbag Keuangan & Kasubbag Umum & Kepegawaian	Inspektur	Tahun 2022	Hardcopy & Softcopy	Selama Dibutuhkan	-
11	Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik		Sekretaris	Inspektur	Tahun 2022	Hardcopy & Softcopy	Selama Dibutuhkan	-
12	Agenda kerja pimpinan satuan kerja		Kasubbag Umum & Kepegawaian	Inspektur	Tahun 2022	Hardcopy & Softcopy	Selama Dibutuhkan	-
13	Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya		Kasubbag Umum & Kepegawaian	Inspektur	Tahun 2022	Hardcopy & Softcopy	Selama Dibutuhkan	-

C. DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Konten Informasi	Dasar Hukum	Alasan Informasi dikecualikan	Batas Waktu Pengecualiaan	Konsekuensi	
					Akibat Jika Info dibuka	Manfaat Jika Info ditutup
1	2	3	4	5	6	7
1	Database PNS yang terkait dengan riwayat kesehatan, kekayaan, rekening pribadi, penilaian kinerja, penjatuh hukuman disiplin PNS, dll	UU Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28 H U No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf f	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konsitusi	Tidak Terbatas	Mengungkap Data Pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konsitusi	Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Daftar Nilai DP3/Sasaran Kinerja Pegawai PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h PP No 10 Tahun 1979 tentang penilaian Pelaksana Pekerjaan PNS Pasal 6	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konsitusi	Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4	Data Rekam Medis PNS:	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Permenkes RI No 269/Menkes/III/2008 tentang rekam medis (pasal 10)	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konsitusi	Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS Dapat merugikan PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia Untuk melindungi keamanan dan kenyamanan PNS
5	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf f	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konsitusi	Tidak Terbatas	Mengungkapkan Data Pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf f	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konsitusi	Tidak Terbatas	Mengungkapkan Data Pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
7	Data Usulan Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural II, III dan IV.	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h PP No 100 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Jo. PP No. 13 tahun 2002 tentang perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 -> Pasal huruf j UU KIP.	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS	Tidak Terbatas	Mengganggu, menghambat, dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan dapat merugikan PNS.	Menjaga kondusifitas, keamanan, dan kepastian hukum
8	Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia (lelang yang masih berjalan atau kegiatan yang masih berjalan atau belum dipertanggungjawabkan (pemeriksaan/pengawasan)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tidak terbatas, kecuali setelah selesai di pemeriksaan/pengawasan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen
9	Dokumen penawaran kontrak, ketika masih dalam proses pengadaan barang dan jasa.	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j Perpres Nomor 54/2010 pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat	terbatas sampai dengan proses pengadaan Barang/jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektifitas penilaian

No.	Konten Informasi	Dasar Hukum	Alasan Informasi dikecualikan	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Jika Info dibuka	Manfaat Jika Info ditutup
1	2	3	4	5	6	7
10	Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengawasan	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah Permendagri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I Bab Norma Pelaporan Huruf a	Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengawasan jika dikuasai oleh orang/pihak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegak hukum	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
11	Surat pengaduan masyarakat	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf A dan J	Menjamin kerahasiaan pelapor dan terlapor	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegak hukum	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan

Profil Ketua PPID Pembantu Inspektorat Kabupaten Wonogiri

a Nama : TRI LASMI, S.E., M.M.
b NIP : 19670129 199503 2 002
c Jabatan : Sekretaris
d No HP : 0812 1580 9343

Petugas Pelayanan Informasi

a Nama : MURNI HASTUTI, S.E.
b NIP : 19750710 200903 2 003
c Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian
d No HP : 0813 2974 6876



INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI

MARDIANTO, S.E.

Pembina Utama Muda

NIP.19710124 199903 1 002